

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, (1986), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni
- Angger Sigit Pramukti, E. W. (2015). *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Boedi Harsono, (1994) *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Effendi Perangin, (1987), *Praktek Jual-beli Tanah*, Jakarta, Rajawali Pers
- Mariam Darus Badruzaman, (2011), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sutedi Andrian, (2010) *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suriyaman Mustari Pide, (2014), *Hukum Adat*, Jakarta: Prenadamedia grup
- Soedharyo Soimin (2004), *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soepomo. R (1994) *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Piramita
- Yahya Harahap M, (2008), *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

- Adilan Sutedi, (2010) *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi I, cetakan keempat*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atik Winanti, T. R. (2020). Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol. 3, No. 2*.
- Arina Ratna, “WANPRESTASI dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan (STUDI penelitian pada pengembang kota semarang)” *Diponegoro Law Journal Vol/5, No.3, Tahun 2016*

Skripsi

Retno Setiyo Pamungkasi, “*Wanprestasi dalam jual-Beli tanah*” (Surabaya: UPNV Jawa Timur, 2018)

Afrun Musridathul, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor 663/Pdt.G/2017/Pn.Sby)*, (Jember: Universitas Jember, 2019)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 102

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah